

**PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2018)**

**Meli Okta Melina; Bakkareng; Sri Yuli Ayu Putri**

*Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi*

*Email : [melioktamelina0310@gmail.com](mailto:melioktamelina0310@gmail.com)*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2018), baik secara parsial maupun simultan. Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data kuantitatif yang bersumber dari lapoaran keuangan tahunan yang bersumber dari laporan *Annual report*. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 berjumlah 26 populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai kriteria yang ditentukan diperoleh sebanyak 8 perusahaan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). *Corporate Social Responsibility* terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap Agresivitas Pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,318 > 1,70113$ ) atau nilai signifikan 0,028 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. 2). Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap Agresivitas Pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,134 < 1,70113$ ) atau nilai signifikan 0,895 lebih besar dari  $\alpha$  0,05.3). Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Agresivitas Pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,168 > 1,70113$ ) atau nilai signifikan 0,039 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 4). *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $4,855 > 2,95$ ) atau nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05.

**Kata Kunci :** *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak.

*The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure On Corporate Governance On Tax Aggressiveness (Studies Empirical On Food And Beverage Manufacturing Companies Listed On The Bei Period 2015-2018)*

**Meli Okta Melina; Bakkareng; Sri Yuli Ayu Putri**

*Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi*

*Email : [melioktamelina0310@gmail.com](mailto:melioktamelina0310@gmail.com)*

**Abstract**

*This study aims to determine and analyze the Effect of Disclosure of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Against Tax Aggressiveness (Empirical Study of Food and Beverage Manufacturing Companies Listed in BEI 2015-2018), both partially and simultaneously. The type of data used in this research is quantitative data sourced from annual financial reports sourced from Annual report. The data source in this study is secondary data. The population in this study is the food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018 totaling 26 populations. The sample collection technique uses purposive sampling technique according to the specified criteria obtained by 8 companies. Data analysis method in this research uses multiple linear regression. The results of this study indicate that: 1). Corporate Social Responsibility there is a partially significant effect on tax aggressiveness, this can be seen from the  $t_{count} > t_{table}$  ( $2.318 > 1.70113$ ) or a significant value of 0.028 which is smaller than  $\alpha 0.05$ . 2). The Independent Board of Commissioners has no partial effect on Tax Aggressiveness, this can be seen from the  $t_{count} < t_{table}$  ( $-0.134 < 1.70113$ ) or a significant value of 0.895 which is greater than  $\alpha 0.05$ . 3). Institutional ownership has a significant effect partially on Tax Aggressiveness, this can be seen from the  $t_{count} > t_{table}$  ( $2.168 < 1.70113$ ) or a significant value of 0.039 which is smaller than  $\alpha 0.05$  4). Corporate Social Responsibility, Independent Board of Commissioners and Institutional Ownership simultaneously influence Tax Aggressiveness, this can be seen from the value of  $F_{count} > F_{table}$  ( $4.855 > 2.95$ ) or a significant value of 0.008 which is smaller than  $\alpha 0.05$ .*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Independent Board of Commissioners and Institutional Ownership of Tax Aggressiveness*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan penerimaan bagi negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. Seprini (2016) mengatakan pajak yaitu sektor penting yang menjadi sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar di Indonesia. Pajak berkontribusi sebesar 70% dari seluruh penerimaan negara. Sumber pendapatan pajak di Indonesia berasal dari dua wajib pajak, wajib pajak baik orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)”. Pemerintah menggunakan pendapatan dari sektor pajak ini untuk membiayai semua penyelenggaraan negara, termasuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan Gunawan (2017) mengatakan tujuan perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan melalui cara efisiensi pajak yang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam mensejahterakan *shareholder* dan mempertahankan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Namun disisi lain, berkurangnya penerimaan pajak negara berdampak negatif pada penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu tanggungjawab dan wujud kontribusi perusahaan terhadap sosial, ekonomi dan masyarakat di suatu negara.

Kurangnya kesadaran serta kepedulian wajib pajak pada pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak perusahaan ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan tindakan yang agresif seperti penghindaran pajak. Agresivitas pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan. Pemerintah berupaya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak agar bisa membiayai seluruh penyelenggaraan negara.

Menurut Muhammad Yasir Yusuf (2017:3) *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pradipta (2015) praktik penghindaran pajak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi perusahaan. Oleh karena itu menjadikan perusahaan dinilai tidak bertanggung jawab secara sosial.

Rengganis (2018) perusahaan sebagai organisasi yang sangat berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan tentunya tidak menginginkan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Salah satu upaya dalam mengendalikan tindakan agresivitas pajak yaitu dengan cara melaksanakan *Corporate Governance* sehingga dapat mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Aturan struktur *Corporate governace* pada perusahaan dapat menentukan pembuatan kebijakan termasuk

dalam hal kebijakan perpajakan, namun di lain sisi tindakan pengelolaan pajak tergantung pada mekanisme berjalannya *corporate governance* pada perusahaan.

Apabila dalam sebuah perusahaan mekanisme *Corporate Governace* dapat terlaksana dengan baik, maka akan berpengaruh juga dalam meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham. Untuk memahami konsep *Corporate Governance* teori yang tepat untuk digunakan adalah teori agensi. Berdasarkan teori ini, tata kelola suatu perusahaan harus diawasi serta di kendalikan guna memberikan keyakinan bahwa tata kelola perusahaan sudah dijalankan dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui Proksi Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional yang berkewajiban melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang atau kontradiksi dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Handayani (2017) Dewan Komisaris Independen di dalam suatu perusahaan menjadi penengah antara manajemen dan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak Maulana (2019) Kepemilikan Institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal karena mempunyai kemampuan memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan secara efektif.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena pertama, Feranika (2016) penelitian ini dimotivasi karena maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama atau *Go Public*. Kedua untuk mengetahui pengaruh tindakan pajak agresif oleh *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* menunjukkan tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Dimana perusahaan membutuhkan *image* yang baik dari masyarakat karena rentan terhadap pengaruh politik dan kritikan dari aktivitas-aktivitas sosial. Atas dasar inilah maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang dapat memperburuk *image* perusahaan seperti penghindaran pajak. Begitu pula dengan *Corporate Governance* yang baik sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol manajer yang mampu mengurangi tindakan oportunistik dalam memaksimalkan kepentingan sendiri. Penerapan prinsip *Corporate Governance* dapat mengurangi tindakan pajak agresif yang mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit bagi manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak.

CNN Indonesia (2016) fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan berpandangan bahwa adanya sejumlah nama pengusaha dan elite politik Indonesia yang tercantum dalam data Panama Papers menjadi bukti bahwa Indonesia sedang dalam darurat mafia perpajakan. Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasonko mengatakan, Global Financial Integrity (GFI) 2015 melaporkan bahwa setiap tahun negara berkembang kehilangan US\$1 triliun akibat korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang. GFI memprediksi bahwa potensi pajak yang menguap dari Indonesia karena praktik pelarian uang, haram dari Indonesia hampir Rp 200 triliun setiap tahunnya. Dengan adanya permasalahan ini, Maftuchan menegaskan bahwa forumnya mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pemberian pengampunya pajak (*tax amnesty*) kepada

wajib pajak super kaya dan korporasi, karena akan kontra-produktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari Seprini (2016) yaitu peneliti menggunakan sub sektor makanan dan minuman tahun 2015-2018 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sub sektor pertambangan tahun 2011-2013. Alasan dipilihnya sub sektor makanan dan minuman Gunawan (2017) karena sektor ini merupakan sektor industri yang produknya sangat dibutuhkan masyarakat sebagai kebutuhan primer. Sehingga dalam meminimalisir anggaran biaya perpajakan perusahaan akan menekan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan cara mengatur dan mengendalikan keuangan perusahaan. Perusahaan perlu memiliki *Corporate Governance* untuk memudahkan pembayaran pajak tanpa mempersulit atau memperbanyak pengeluaran beban biaya yang harus dibayarkan kepada wajib pajak.

Alasan peneliti hanya memilih dua proksi dari variabel *Corporate Governance* karena pada penelitian ini merupakan salah satu elemen kunci dalam manajemen perusahaan. Handayani (2017) Dewan Komisaris Independen berperan dalam menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Kepemilikan Institusional mempunyai peran penting dalam mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen agar lebih optimal. Hal inilah yang memberikan struktur untuk menentukan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan monitoring kinerja perusahaan.

Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak, maka peneliti melakukan penelitian dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek dan dalam rentang waktu empat tahun. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2018)**

### Rumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional memberikan pengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

#### Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:26) pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang yang mengatur tentang Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan menempatkan perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali pada undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), pasal 1 angka (1), “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi tersebut, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pungutan secara paksa oleh Negara
- b. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung
- c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self-assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban pajak bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik sebagaimana mestinya.

#### Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

Menurut Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan Fungsi mengatur (*cregulerend*) yaitu:

##### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

##### 2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

### Agresivitas Pajak

Penghindaran pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:370) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Suahasil Nazara (2018:134) Keputusan manajemen dalam mengambil kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak jangka panjang selain dapat berpengaruh pada nilai perusahaan seperti yang diharapkan, juga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi karena adanya asimetri informasi sehingga timbul perbedaan persepsi antara investor dan manajer tentang kebijakan penghindaran pajak. Investor menganggap kebijakan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan yang tidak patuh pada peraturan pajak dan akan menambah biaya dikemudian hari seperti biaya yang timbul dalam melaksanakan kegiatan penghindaran pajak, dan dianggap sebagai salah cara manajemen untuk memanipulasi informasi laba sehingga menunjukkan kinerja yang baik tanpa menampilkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

Tindakan agresivitas pajak sudah menjadi hal yang umum dilakukan di dalam dunia bisnis. Pradipta (2015) agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk memanipulasi nilai pendapatan pajak bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal ataupun ilegal, kedua hal ini tetap menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyampaikan pajak.

Penelitian ini ditegaskan oleh Jessica dan Toly (2014) Kebanyakan dari masyarakat memandang bahwa perusahaan yang melakukan tindakan Agresivitas dianggap telah menjalankan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Pada penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). ETR merupakan gambaran atas besarnya laba sebelum pajak untuk membayar beban pajak perusahaan, jika nilai ETR rendah maka dapat dipastikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak.

$$\text{ETR} = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Sumber : Rist dan Pizzica (2015:54)

### *Corporate Social Responsibility*

Menurut Muhammad Yasir Yusuf (2017:3) *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja. Jessica dan Toly (2014) *World Bank* memandang *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup. *Corporate Social Responsibility* menyeimbangkan antara kepedulian sosial perusahaan dalam aktivitas bisnis dan interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan prinsip sukarela. *Corporate Social*

*Responsibility* diharapkan mendapat respon yang baik dari masyarakat yang berada disekitar perusahaan, karena *Corporate Social Responsibility* yaitu kunci keberhasilan perusahaan agar keberlanjutan usaha atau bisnisnya berjalan lancar.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang harus diperhatikan perusahaan adalah :

1. Bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan  
Ini menyangkut masalah populasi, kontaminasi zat-zat berbahaya yang merusak udara, air dan tanah. Ini disebabkan oleh gas buangan knalpot mobil, motor, industri yang dapat menyebabkan hujan asam yang dapat merusak hutan.
2. Bertanggungjawab terhadap konsumen  
Dengan memperhatikan hak-hak konsumen maka hal ini akan dapat dicegah munculnya gejala *consumenris* karena perlakuan produsen yang tidak baik terhadap konsumen. 2%
3. Tanggungjawab terhadap investor  
Para investor harus memperhatikan etika dan tanggungjawab perusahaan dimana mereka melakukan investasi. Investor tidak akan suka jika perusahaan memanipulasi data dalam pembukuan bisnis sehingga merugikan pihak investor.
4. Tanggungjawab terhadap karyawan  
Para pengusaha mulai berhati-hati merekrut karyawan, melatih dan menaikkan pangkat karyawannya agar selalu mengait dengan masalah perilaku, tanggungjawab dan etika yang dijalankan oleh perusahaan.

### **Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Dalam buku Achmad Lamo Said (2018:4) *Corporate Social Responsibility* adalah kewajiban sosial swasta atau perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai dampak dari ekspansi bisnisnya yang dimungkinkan telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dimana mereka menjalankan aktifitasnya. Dalam implementasi dan penerapan *Corporate Social Responsibility* ini sangat tergantung pada konsep *governance* bagaimana dijalankan diwilayah/daerah tersebut.

Transparansi informasi yang diungkapkan perusahaan diharapkan juga mengungkapkan informasi mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktifitas perusahaan. Hal ini dapat memacu adanya perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal saat ini sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pengukuran variabel CSR ini dilakukan dengan menggunakan *check list* yang mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI). *Corporate Social Responsibility* dihitung berdasarkan jumlah pengungkapan sosial perusahaan dan dibagi dengan 91 indikator berdasarkan GRI-G4 dari sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. (Sumber : [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

GRI-G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Pengukurannya melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Sumber : Jessica., Toly, (2014)



Keterangan:

CSRDI<sub>j</sub> : indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i

$\sum X_{yi}$  : nilai 1= jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan

n : jumlah item untuk perusahaan I,  $n \leq 91$

### **Corporate Governance**

Menurut Effendi, Muh. Arief (2018:2) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan resiko investasi pedagang saham dalam jangka panjang.

Sandy dan Lukviarman (2015) memperjelas pada penelitiannya prinsip-prinsip *corporate governance* sangatlah diperlukan dalam melakukan penyajian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Bab II pasal 3 mengenai penerapan praktik *corporate governance* pada BUMN mengatakan bahwa terdapat lima asas *corporate governance* yang ada di Indonesia, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

### **Dewan Komisaris Independen**

Dalam buku Riska Franita (2018:12) implementasi dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan komisaris inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Handayani (2017) Komisaris Independen berperan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Komisaris Independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku termasuk keputusan perpajakan. Hal ini agar menjadikan laporan keuangan lebih obyektif.

Feranika Ayu (2016) mengungkapkan pada penelitiannya, dengan adanya Dewan Komisaris Independen yang lebih banyak dapat digunakan untuk menekan tingkat pajak dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris independen yang lebih sedikit. Hanim dan Fatahurrazak (2018) Skala yang digunakan untuk mengukur persentase komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris.

$$DKI = \frac{\text{jumlah total anggota dewan komisaris}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}$$

Sumber : Hanim dan Fatahurrazak (2018)

### **Kepemilikan Institusional**

Muhammad Tamrin, Bahtiar Maddatuang (2019:72) Mendefinisikan Kepemilikan Institusional yaitu persentase saham yang dimiliki oleh institusi

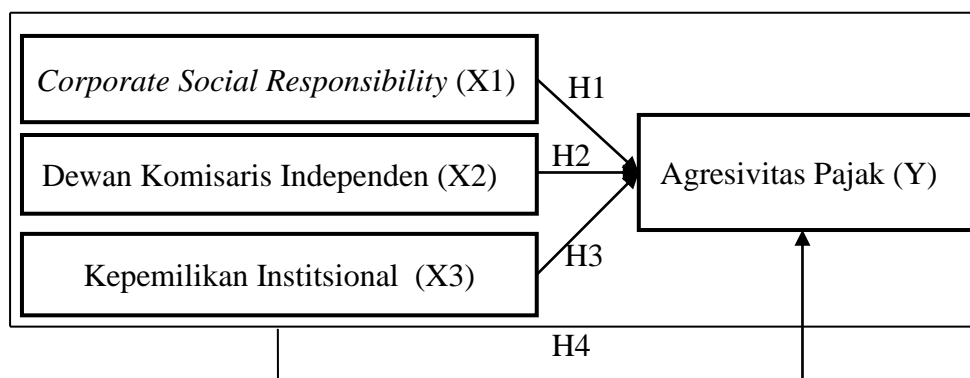
seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Menurut Handayani (2017) Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern.

Penelitian ini sejalan dengan Diantari (2016) Kepemilikan Institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Feranika (2016) kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan persentase saham yang dimiliki institusi, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas 5%, tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial.

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{jumlah kepemilikan institusional}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Sumber : Riska Franita (2018:15)

### Kerangka Konseptual



### Hipotesis

- H1:** Diduga *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H2:** Diduga Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
- H3:** Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
- H4:** Diduga *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh simultan terhadap Agresivitas Pajak

### METODE PENELITIAN

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

### **Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Menurut Anwar Sanusi (2016 : 32) Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian yang bersifat kepustakaan.

#### 2. Website

Metode ini digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Studi Dokumentasi

Sugiyono (2018:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 2. Studi Internet

Metode yang digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2015 : 84) jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dan kuantitatif.

#### 1. Data kualitatif

Yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.

#### 2. Data kuantitatif

Yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka

#### **Sumber Data**

#### 1. Data primer

Menurut Sugiyono (2014 : 308) Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru karena bersifat *up to date*.

#### 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua) seperti pada Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

#### 1. Populasi Penelitian

Hengki Wijaya (2018:9) populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2018. Populasi pada penelitian ini berjumlah 26 Perusahaan.

## 2. Sampel Penelitian

Hengki Wijaya (2018:11) Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan atas kriteria-kriteria atau cirri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sampel itu. Perusahaan yang dijadikan sampel merupakan perusahaan yang memenuhi kriteria berikut:

1. Jumlah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2018
2. Jumlah perusahaan yang mengeluarkan Annual Report 2015-2018.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan pengungkapan CSR dalam Annual Report 2015-2018.
4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam Annual Report 2015-2018.

## Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Dependen (Y) Agresivitas Pajak	Merupakan upaya pengindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Sumber: Pohan Chairil Anwar (2017:370)	$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$ sumber: Rist dan Pizzica (2015:54) Alasan : ETR digunakan karena dalam meminimalkan pajak tidak hanya bersumber dari pajak dan penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan.
Independen (X1) <i>Corporate Social Responsibility</i>	Yaitu tanggungjawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Sumber: Muhammad Yasir Yusuf (2017:3)	$CSRDI_j = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$ sumber: Jessica., Toly, (2014) Alasan: Dengan adanya <i>Corporate Social Responsibility</i> lebih banyak maka perusahaan dapat menekankan beban pajaknya dan meningkatkan laba perusahaan.
Independen (X2) Dewan Komisaris Independen	berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen sumber: Riska Franita (2018:12)	$DKI = \frac{\text{Jumah total anggota dewan komisaris}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}$ Sumber : Hanim dan Fatahurrzak (2018) Alasan: Dengan adanya dewan komisaris yang lebih banyak dapat digunakan untuk menekan tingkat pajak dibandingkan perusahaan dengan dewan komisaris yang lebih sedikit
Independen (X3) Kepeilikan Institusional	yaitu persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain dan berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal Sumber: Bahtiar Maddatuang (2019:72)	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$ sumber: Riska Franita (2018:15) Alasan: Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen

## Metode Analisis

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan valid atau tidak bias.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) Uji normalitas digunakan dalam menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

#### 2. Uji Autokorelasi

Ghozali, (2016:106) uji Autokorelasi Autokorelasi yaitu suatu keadaan dimana terjadi korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya.

#### 3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

## Analisis Statistik

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Agussalim Manguluang (2015:81) regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikat Y dihubungkan / dijelaskan lebih dari satu variabel X.

### 2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Ghozali (2016:95) nilai Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

## Metode Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Parameter Parsial (Uji Sig t)

Ghozali (2016:97) Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel secara individual dalam menerangkan variasi-variabel independen.

### 2. Uji Kelayakan Simultan (Uji Sig F)

Uji F dilakukan untuk menguji digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016:154)

N	Unstandardized Residual
	32
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,167

Dari tabel diatas didapatkan nilai residual sebesar 0,167 lebih besar dari 0,05 dari nilai sampel sebesar 32. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi  $>0,05$  (Imam Ghozali, 2016:154) yang berarti data yang sedang diuji berdistribusi normal.

## 2. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,178

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai durbin watson senilai 2,178 maka dari perhitungan ( $du < d < 4-du$ ) atau  $1.650 < \text{Durbin-Watson} (2,178) < 4-du (2,350)$  dapat disimpulkan bahwa Durbin Watson Test terletak pada daerah yang tidak terdapat gejala autokorelasi.

## 3. Uji Multikolinearitas

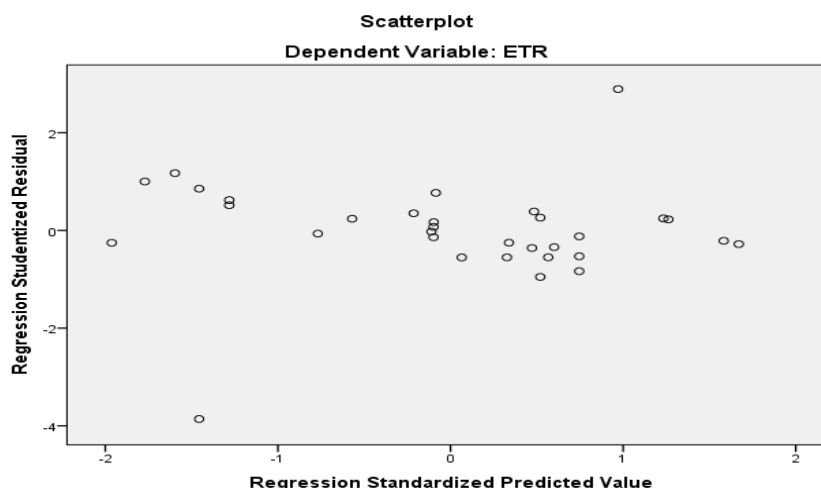
Menurut Ghazali (2016) untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	x1	0,697	1,434
	x2	0,664	1,506
	x3	0,858	1,165

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa :

- Variabel Corporate Social Responsibility tidak terdapat gejala multikolinearitas dikarenakan nilai VIF sebesar 1,434 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 0,697 lebih besar dari 0,10.
- Variabel Dewan Komisaris Independen tidak terdapat gejala multikolinearitas dikarenakan nilai VIF sebesar 1,506 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 0,664 lebih besar dari 0,10.
- Variabel Kepemilikan Institusional tidak terdapat gejala multikolinearitas dikarenakan nilai VIF sebesar 1,165 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 0,858 lebih besar dari 0,10.

## 4. Uji Heteroskedastisitas



## Metode Analisis Data Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-0,526	0,109
	x1	0,203	0,088
	x2	-0,040	0,301
	X3	-0,320	0,148

Dari tabel di atas dapat ditarik persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = -0,526 + 0,203X_1 - 0,040X_2 - 0,320X_3 + 0,109e$$

- Nilai konstanta sebesar -0,526 hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Corporate Social Responsibility (X<sub>1</sub>), Dewan Komisaris Independen (X<sub>2</sub>) dan Kepemilikan Institusional (X<sub>3</sub>) bernilai nol (0) satuan maka nilai Effective Tax Rates adalah sebesar -0,526 satuan.
- Nilai koefisien regresi variabel Corporate Social Responsibility sebesar 0,203, berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Corporate Social Responsibility sebesar satu satuan maka Effective Tax Rates akan meningkat sebesar 0,203.
- Nilai koefisien regresi variabel Dewan Komisaris Independen sebesar -0,040, berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Dewan Komisaris Independen sebesar satu satuan maka Effective Tax Rates akan menurun sebesar -0,040.
- Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional sebesar -0,320, berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Kepemilikan Institusional sebesar satu satuan maka Effective Tax Rates akan menurun sebesar -0,320.

### Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,585 <sup>a</sup>	0,342	0,272	0,10169

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,272 atau 27,2%, hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel independen *Corporate Social Responsibility* (X<sub>1</sub>), Dewan Komisaris Independen (X<sub>2</sub>) dan Kepemilikan Institusional (X<sub>3</sub>) menjelaskan variabel dependen Agresivitas Pajak (Y) sebesar 0,272 atau 27,2%. Sedangkan sisanya sebesar 72,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,526	,109		-4,811	,000
	x1	,203	,088	,426	2,318	,028
	x2	-,040	,301	-,025	-,134	,895
	X3	-,320	,148	-,359	-2,168	,039

Pengujian hasil uji t didapatkan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dan t tabel pada signifikansi 0,05 uji dua arah dengan derajat kebebasan (Ghazali, 2016:97). Sehingga didapatkan  $df = n - k =$

$32-4 = 28$ , (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel bebas dan terikat) dengan nilai t tabel sebesar 1,70113.

Hasil uji t diatas diketahui sebagai berikut :

- a. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak  
 Nilai t hitung dari variabel *Corporate Social Responsibility* adalah sebesar 2,318 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,70113. Sehingga  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan nilai probabilitas (probability value) perhitungan yang diperoleh adalah sebesar  $0,028 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak  
 Nilai t hitung dari variabel Dewan Komisaris Independen adalah sebesar - 0,134 yang nilainya lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,70113. Sehingga  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  dan nilai probabilitas (probability value) perhitungan yang diperoleh adalah sebesar  $0,895 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak  
 Nilai t hitung dari variabel Kepemilikan Institusional adalah sebesar -2,168 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,70113. Sehingga  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan nilai probabilitas (probability value) perhitungan yang diperoleh adalah sebesar  $0,039 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

## 2. Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	,151	3	,050	4,855	,008 <sup>b</sup>
	Residual	,290	28	.010		
	Total	,440	31			

Dari tabel tersebut diketahui nilai F sebesar 4,855 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,95 dan nilai sig yang dihasilkan dari perhitungan adalah  $0,008 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan variabel *Corporate Social Responsibility* ( $X_1$ ), Dewan Komisaris Independen ( $X_2$ ) dan Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ) secara simultan / bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018, Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.10 *Coeffecient* diperoleh sebesar 2,318 dan t tabel sebesar 1,70113. Nilai signifikansinya adalah 0,028 yang artinya variabel *Corporate Social Responsibility*. (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih



banyak akan cenderung melakukan agresivitas pajak karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha melakukan pengalihan perhatian sehingga mengungkapkan aktivitas CSR lebih luas untuk mendapat citra positif dari para stakeholder.

## **2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas pajak manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.10 coefficient diperoleh sebesar -0,134 dan t tabel sebesar 1,70113. Nilai signifikansinya adalah 0,859 yang artinya variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Dewan Komisaris Independen tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen dan tidak efektif dalam terjadinya agresivitas pajak.

## **3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas pajak manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah ada Kepemilikan Institusional terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.10 coefficient diperoleh sebesar -2,168 dan t tabel sebesar 1,70113. Nilai signifikansinya adalah 0,039 yang artinya variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas. Pajak Hal ini karena terdapat tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba setelah pajak.

## **4. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018, hasil ini terlihat dari hasil uji F dengan F hitung sebesar 4,855 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,95 dan nilai signifikan sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akmal Maulana (2019) dimana Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dan juga didukung oleh penelitian Rini Handayani (2017) yang menyatakan Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak secara simultan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan

- terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur sector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018 . Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,318 dengan nilai signifikan sebesar 0,028 dimana nilai signifikannya  $< 0,05$  serta nilai beta sebesar 0,426.
2. Dewan Komisaris Independen (DKI) tidak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur sector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -0,134 dengan nilai signifikan sebesar 0,895 dimana nilai signifikannya  $> 0,05$  serta nilai beta sebesar -0,025.
  3. Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -2,168 dengan nilai signifikan sebesar 0,039 dimana nilai signifikannya  $< 0,05$  serta nilai beta sebesar -0,359.
  4. *Corporate Social Responsibility* ( $X_1$ ), Dewan Komisaris Independen ( $X_2$ ) dan Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ) berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas. Pajak ( $Y$ ) karena berdasarkan hasil uji t didapatkan nilai F hitung sebesar 4,855 lebih besar dari F tabel sebesar 2,95 dan nilai signifikan sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hasil dari *Corporate Social Responsibility* dapat menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Disarankan perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kesadaran perusahaan akan *Corporate Social Responsibility* agar bentuk tanggungjawab perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pajak dapat juga ditingkatkan.
2. Hasil dari Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Disarankan perusahaan seharusnya dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan Agresivitas Pajak.
3. Hasil dari Kepemilikan Institusional dapat menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Disarankan agar pemilik institusional untuk melakukan kebijakan pengelolaan pajak dengan baik agar dapat menghindari keputusan oportunistik Agresivitas Pajak bagi para pemegang saham.
4. Hasil dari *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional dapat menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Disarankan sebaiknya kesadaran perusahaan akan adanya *Corporate Social Responsibility*, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional semakin meningkat dan dapat mensejahterakan masyarakat melalui pembayaran pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Lamo Said, 2018, *Corporate Social Responsibility dan Prespektif Governance*, Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Agussalim, Manguluang, 2015, *Statistik Dasar*, Cetakan Pertama Ekasakti Press: UNES Padang
- Anwar Sanusi, 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat
- Chairil Anwar Pohan, 2017, *Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*, Edisi 2, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Effendi, Muh. Arief, 2018 *The Power Of Good Corporate Governance*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM spss19*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hengki Wijaya, 2018, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Sulawesi Selatan: Kencana
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Muhammad Tamrin, Bahtiar Maddatuang, 2019, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance Dalam Industri Manufaktur Indonesia*, Bogor : IPB Press
- Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility*, Depok: Kencana.
- Riska Franita, 2018, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan*, Medan
- Rist Michael, Pizzica Albert J, 2015, *Financial Ratios For Executives*, New York : Apress.
- Suahasil Nazara, 2018, *Kebijakan Multilateral Dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, Prof.Dr, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R & D*, penerbit Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Diantri, P,R., 2016 Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance., *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702-732

- Gunawan, J., 2017, Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak, *Jurnal Akuntansi*, 21(03), 425-426.
- Handayani, R., 2017, Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Perbankan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(3), 114-131
- Hanim, H., Fatahurrazak., 2018, Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 1(2), 37-45
- Jessica., Toly, A.A., 2014, Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak, *Jurnal Akuntansi*, 4(1)
- Maulana, A., Yuliandari, W, S., & Kurnia., 2019, Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak, *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 3084
- Rengganis, M,Y,D., 2018, Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak, *Jurnal Akuntansi*, 24(2), 871-898
- Sandy, Syeldila., & Lukvirman, S., 2015, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance, Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19 (2), 85-98.
- Feranika, A., 2016, *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Jambi.
- Pradipta, D,H., 2015, *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.*. Skripsi, Fakultas Ekonomi: Universitas Gadjah Mada
- Seprini., 2016, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif.*. Skripsi, Fakultas Ekonomi: Universitas Riau.

<https://www.cnnindonesia.com>

<https://www.idx.co.id>

<https://www.globalreporting.org>